

BAB V

KESIMPULAN

Ketika berbicara tentang politik, maka tidak akan terlepas yang namanya kepentingan. Ada dua hal menurut Alwi Shihab (Mantan Menteri Luar Negeri RI), yaitu: *Pertama*, Diharapkan lobi Indonesia didunia menjadi kuat terhadap tekanan kepentingan Barat (IMF, WTO, AS, dsb.). *Kedua*, Investor Yahudi dan Israel berbondong-bondong menanamkan modalnya di Indonesia.

Akan tetapi untuk menuju rencana tersebut, Indonesia akan mengalami polemik yang sudah tentu akan ditentang oleh kalangan muslim. Maka nantinya akan menjadi pertanyaan mengapa tidak meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara yang secara umum tidak bermasalah dimata masyarakat Indonesia dan tidak semata karena pertimbangan- pertimbangan pragmatis. Misalnya kualitas hubungan dengan negara-negara OKI dan ASEAN ditingkatkan. Dari hasil penelitian penulis, maka bisa diambil kesimpulan bahwa:

1. Di bidang ekonomi, Indonesia dan Israel melakukan kerja sama ekonomi melalui perdagangan dan investasi. Israel merupakan negara industri yang didukung dengan teknologi tinggi (*high-tech*) terutama di sektor agrikultur, energi terbarukan dan teknologi perangkat lunak. Dalam hal ini, Israel membutuhkan pasar yang besar untuk produk-produk industri tersebut. Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar dengan tingkat konsumsi yang

tinggi sangat potensial bagi tujuan ekspor Israel. Kepentingan Indonesia terhadap Israel di bidang ekonomi, yaitu memanfaatkan keunggulan teknologi tinggi Israel tersebut untuk peningkatan hasil produksi-produksi domestiknya yang didukung dengan sumber daya alam yang melimpah. Sedangkan, Israel dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia untuk mengimpor bahan mentah guna menunjang industrinya. Dengan beroperasinya perusahaan-perusahaan multinasional dari Israel yang berinvestasi di Indonesia, maka benefitnya adalah selain adanya transfer teknologi, juga penyerapan lapangan pekerjaan terutama dalam perusahaan manufaktur

2. Dalam sudut pandang Politik, banyak faktor yang menyebabkan kecilnya kemungkinan dapat dibukanya hubungan diplomatik secara formal yang jelas akan terbentur pada amanat konstitusi terutama pembukaan UUD, selain itu tekanan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil yang akan memojokkan pemerintah.
3. Sudah terjalinnya hubungan ekonomi antara pihak Indonesia dan Israel meskipun harus melalui aktor non negara atau melalui negara ketiga yang bisa dibuktikan dengan keluarnya tabel neraca perdagangan antara kedua negara pada situs kementerian perdagangan merupakan sebuah perubahan yang berarti.
4. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono cenderung lunak menyikapi adanya hubungan dagang / perekonomian antara Indonesia dan Israel yang dilakukan oleh kelompok pengusaha.

5. Hingga saat ini, pemerintah belum berani membuka hubungan dengan Israel secara formal meskipun hanya dalam batasan kerjasama ekonomi yang melibatkan negara, alasannya sama dengan alasan-alasan politik.